



Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 5

Tanggal :

SUBBAGIAN HUMAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota		Warta Kota

ADU DATA AUDIT SUMBER WARAS

BPK dinilai keliru menghitung kerugian pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta memanfaatkan betul laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai ada kerugian negara dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Tak puas hanya membentuk panitia khusus untuk meneliksinya, mereka menghujani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan beragam pertanyaan dalam rapat paripurna pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 dua hari lalu.

Fraksi Gerindra, Hanura, dan Golkar bergantian menggugat pembelian lahan 3,6 hektare di Grogol, Jakarta Barat, itu. Hanura menilai pembelian Sumber Waras tak serius karena hanya dikaji Dinas Kesehatan tanpa melibatkan tim independen. "Sehingga penilaiannya jadi tak komprehensif," kata Syarifudin, legislator Hanura.

Dalam laporan yang dipublikasikan Juli lalu, BPK menyatakan pembelian tanah Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar. Dasarnya adalah penawaran PT Ciputra Karya Unggul—anak usaha Grup Ciputra—pada 2013 senilai Rp 15 juta per meter persegi.

BPK juga menilai pembelian pada akhir tahun lalu itu kemahalan. Menurut BPK, pemerintah seharusnya membeli tanah itu Rp

7 juta per meter persegi sesuai dengan nilai jual obyek pajak lahan di Jalan Tomang Utara. Sedangkan pemerintah mendasarkan pembelian pada nilai pajak lahan di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp 20 juta. Sumber Waras berada di pertemuan dua jalan itu.

Walhasil, BPK menyimpulkan pemerintah telah rugi sekitar Rp 484 miliar karena perbedaan harga itu. Panitia Khusus DPRD turun ke lapangan pada Agustus lalu untuk mengkonfirmasi temuan BPK. Hasilnya, mereka setuju dengan BPK karena akses lahan ke Jalan Kyai Tapa sedang dalam sengketa antara Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras dan induknya, Yayasan Candra Naya.

Selain menimbulkan kerugian, transaksi senilai Rp 755 miliar

tersebut dinilai BPK dilakukan tanpa dokumen perencanaan, studi kelayakan, dan kajian pembangunan rumah sakit kanker dan jantung—tujuan pembelian oleh pemerintah Jakarta itu. Indikasinya, Gubernur Basuki mengambil anggaran dari APBD Perubahan 2014. Wakil Ketua Panitia Khusus, Prabowo Soenirman, menyebutkan pembelian lahan itu mubazir karena pemerintah punya banyak lahan jika ingin membangun rumah sakit.

Gubernur Basuki menyangkal tuduhan pembelian Sumber Waras tergesa-gesa dan tanpa perencanaan. Ia menunjukkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang memuat rencana itu dan telah disetujui Dewan. "Lu kira gampang minta tanda tangan DPRD?" katanya.

Ihwal kerugian negara, Basuki mengatakan data BPK keliru. Basuki mengakui ada perbedaan harga lahan jika dibandingkan dengan tawaran Ciputra setahun sebelumnya. "Dalam setahun itu nilai jual obyek pajak di sana naik 400 persen," kata dia. Begitu juga dengan tuduhan kemahalan.

Menurut Basuki, lahan Sumber Waras mengacu pada nilai pajak Jalan Kyai Tapa, bukan Tomang Utara seperti perhitungan BPK. Hal itu juga termaktub dalam sertifikat dan dokumen pajak Sumber Waras yang diterbitkan pada 1998. Lahan milik Yayasan Kesejahteraan seolah-olah berada di Jalan Tomang Utara setelah dibelah dua akibat konflik itu. "Kalau acuan NJOP ini keliru, BPK harus menyalahkan Kementerian Keuangan juga," kata Basuki.

Dengan data-data yang valid itu, Basuki menolak rekomendasi BPK agar pemerintah meminta sebagian uang pembelian. Ia menuduh audit itu adalah pesanan politik untuk menjegalnya dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017. "BPK mungkin mendapat pesanan karena mereka dipilih oleh orang politik di DPR," kata dia.

Ketua BPK Jakarta Efdinal tak mau menanggapi tuduhan itu. Ia meminta Basuki menyiapkan segala dokumen karena BPK sudah meneruskan audit itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diusul lebih jauh. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah keluar," kata dia.



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

SUBBAGIAN HUMAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota		Warta Kota

TEMPO/STR/FRANOTO



Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, 21 Agustus lalu.



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	



“BPK mungkin mendapat pesanan karena mereka dipilih oleh orang politik di DPR.”

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

GOVERNOR

Rp 1,5 Triliun dari EMJI

Lembaga keuangan internasional, EMJI Capital Group, rupanya menangkap peluang bisnis dalam rencana pemerintah DKI membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Dalam dokumen penawaran yang diperoleh *Tempo*, EMJI menawarkan pinjaman Rp 1,5 triliun pada November tahun lalu. “Tahu-tahu proposal mereka sudah ada di meja saya,” kata Mulyadi, Kepala Bagian Umum Dinas Kesehatan, juru negosiasi pembelian. ● ERWAN HERMAWAN

Perusahaan yang berkantor di Washington, DC, Amerika Serikat, itu mengusulkan pembiayaan sebagai berikut:



Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak menggubris tawaran itu. Ia memilih memakai APBD Perubahan 2014 untuk membeli lahan 3,6 hektare senilai Rp 755 miliar itu.